

Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue

Zulkifli¹, Cut Mega Putri²

Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar¹²

Email : zulcommunity0813@gmail.com

Citation: Zulkifli., & Putri, C.M. (2023). Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 3(3), 287–291.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/228>

Received: 15 April 2023

Accepted: 25 April 2023

Published: 18 Mei 2023

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

This study aims to identify and examine the role of local governments in alleviating extreme poverty zones in the Simeulue Regency. The theory used in this study is the role of government according, which has four-dimensional variables, including entrepreneurship. Facilities, stimulus, and coordinator. This study uses a qualitative descriptive method with data collection obtained through three triangulation, including interviews, observations, and documentation studies. The data is analyzed through the concept, which includes reduction, showing that the role of the Simeulue District government in alleviating extreme poverty, which is reviewed through four dimensions, is not optimal, where from the variable, the role of the entrepreneur is still minimal work for the indigenous people of Simeulue. Then the last variable of the role of the stimulus of the local government of Simeulue people in extreme poverty zones can make the extremely poor of Simeulue develop more advanced, such as communication training and entrepreneurship.

Keywords: BAPPEDA, Government, Poverty, Extreme, District, Simeulue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengentasan wilayah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Simeulue. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah yang memiliki lima variabel dimensi, diantaranya kewirausahaan, fasilitas, stimulus, koordinasi dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui tiga cara atau triangulasi, meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian data dianalisis melalui konsep, yang termasuk pengurangan menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang ditinjau melalui empat dimensi belum optimal, dimana dari variabel peran wirausaha masih minim pekerjaan bagi masyarakat asli Simeulue. Kemudian variabel terakhir peran stimulus yaitu pemerintah daerah Simeulue, hanya menyediakan masyarakat yang berada dalam

kondisi wilayah kemiskinan ekstrim, yang justru bisa membuat masyarakat Simeulue yang sangat miskin berkembang menjadi maju, seperti pelatihan komunikasi dan kewirausahaan.

Kata Kunci : BAPPEDA, PEMDA, Pengentasan, Kemiskinan Ekstrim

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah umum yang di hadapi oleh semua kecamatan di Kabupaten Simeulue. Secara umum, kemiskinan dapat di definisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan dan peluang-peluang ekonomi yang tersedia (Subianto, 2008).

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), angka kemiskinan di Kabupaten Simeulue 2022, pada tahun 2022 mencapai 2.824 ribu jiwa, atau sekitar 30% dari total jumlah penduduk, yang tersebar di 10 kecamatan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Simeulue telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya dibidang sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Namun dalam perkembangannya, program-program tersebut ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase angka kemiskinan yang turun dari tahun ketahun sangat kecil, bahkan di beberapa wilayah kecamatan justru meningkat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa program-program tersebut belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan termasuk di daerah Kabupaten Simeulue ?. Apa bentuk kendala dan jenis permasalahan yang dihadapi?. Apakah pada level pembuat kebijakan/program, proses pelaksanaan atau proses adaptasi masyarakat yang lambat?, dan lain-lain. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Simeulue selaku lembaga perwakilan pemerintah di daerah memandang perlu dilakukan studi mendalam tentang bentuk/jenis program penganggulangan kemiskinan di wilayah-wilayah yang angka kemiskinannya masih tergolong tinggi, sebagai bahan acuan dalam menyusun program-program kedepan.

Pemetaan rencana program penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas setiap program yang dilaksanakan. Output yang diharapkan dari kegiatan semacam ini, disamping tersedianya informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem dari program-program yang sudah dilaksanakan, juga muncul rekomendasi-rekomendasi spesifik berbasis sumberdaya daerah. Studi-studi semacam ini diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Simeulue dalam membantu camat – camat yang berada di kecamatan untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Simeulue.

Angka kemiskinan di Kabupaten Simeulue masih tergolong tinggi, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah Provinsi Aceh dengan jumlah anggaran yang cukup besar masih belum optimal dalam mengurangi angka kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan. Oleh karenanya, kajian hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kemiskinan di daerah bersangkutan sangat diperlukan. Untuk lebih jelasnya, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simeulue yang masih cukup tinggi. Program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah masih belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Kurangnya data dan informasi seperti potensi, jenis program, kendala/hambatan yang berkaitan dengan daerah-daerah terutama daerah dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat yang tinggal di kecamatan miskin dalam Kabupaten Simeulue. Mengidentifikasi bentuk, jenis dan mekanisme intervensi pemerintah beserta mitra pemerintah (kebijakan dan program/kegiatan) untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simeulue. Mengetahui efektifitas (korelasi) program-program penanggulangan kemiskinan dengan angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Simeulue. Mengidentifikasi peluang pengembangan usaha dan alternatif usaha lainnya. Memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaan program yang sudah berjalan maupun program baru untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantung-kantung kemiskinan.

Manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan terutama pada level kabupaten bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) (Singarimbun dan Effendi, 1987). Responden adalah pejabat di BAPPEDA kabupaten/kota selaku koordinator program penanggulangan kemiskinan di daerah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa serta aparatnya selaku pelaksana paling bawah dalam pengimplementasi program di kantung-kantung kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk mengamati secara langsung obyek penelitian di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data-data seperti jenis mata pencaharian responden, jenis dan bentuk intervensi (program) yang telah dilakukan oleh pemerintah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan peluang usaha masyarakat miskin di Kabupaten Simeulue dianalisis melalui penafsiran kompilasi data, dengan menggunakan acuan dari studi literatur dan juga logika verbal sesuai dengan variabel dengan melakukan pengujian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik, angka harapan lama sekolah, nilai kelulusan peserta didik dan peningkatan sarana prasarana pendukung terutama laboratorium, perpustakaan dan jaringan internet termasuk peningkatan kelulusan uji kompetensi guru yang masih rendah. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur harus menjadi perhatian untuk meningkatkan etos kerja aparatur non produktif, terampil, dan disiplin.

Pangan merupakan pemenuhan kebutuhan pokok yang strategis, saat ini Kabupaten Simeulue masih sangat tergantung pada daerah lain. Kabupaten Simeulue harus mandiri dalam menghasilkan minimal 5 jenis komoditi pangan strategis yaitu: beras, cabai, daging kerbau/sapi, daging ayam, dan garam. Untuk itu pemerintah Kabupaten Simeulue perlu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan peternakan.

Masyarakat Kabupaten Simeulue umumnya adalah petani dan nelayan. Pengembangan usaha produktif masyarakat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan serta kehutanan (hasil hutan bukan kayu). Pengembangan usaha produktif ini dapat menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Simeulue perlu

menjajakan peluang kemitraan dengan dunia usaha (investor) dalam mengembangkan usaha produktif masyarakat. Demikian juga peningkatan keterampilan masyarakat perlu dilakukan dengan cara pendampingan secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Simeulue sebesar 18,98%.

No	Kecamatan	Jumlah Kemiskinan Ekstrem	Jumlah Persentase
1.	Teupah Selatan	18,15	9,7
2.	Simeulue Timur	20,05	2,6
3.	Teupah Barat	16,20	5,03
4.	Teupah Tengah	13,10	6,01
5.	Simeulue Tengah	14,91	7,10
6.	Teluk Dalam	10,10	5,02
7.	Simeulue Cut	6,10	3,03
8.	Salang	16,95	9,2
9.	Simeulue Barat	23,99	12,05
10.	Alafan	9,19	5,01
Total			100

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 18, 98% di Kabupaten Simeulue yang tertinggi di Aceh perlu pemerintah daerah setempat membuat program bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial tunai (BST), dan program keluarga harapan (PKH). Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Simeulue bahwa untuk memperkecil angka kemiskinan ekstrem dilakukan padat karya dari dana desa yang ada di kabupaten Simeulue tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Simeulue dalam Angka 2021-2022.
- Chalid, P. (2006). Teori dan isu pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Houghton, J., dan Khandker, S. R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington, DC: The World Bank.
- Medah, M. S. (2013). Analisis Beberapa Faktor Penyebab Kemiskinan Petani Di Kecamatan Kupang Timur–Kabupaten Kupang. *PARTNER*, 20(2), 144-153.
- Munkner, Hans H dan Thomas W, (2001). Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin, dalam Menggempur Akar-Akar Kemiskinan (Izzedin Bakhit dkk), *Attacking the Roots of Poverty*, Jakarta: Yakoma-PGI.
- Pabudu. (2005). Metode Penelitian Geografi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pattinama, M.J., (2009). Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1), pp.1-12.
- Singarimbun, M, dan Effendi, S. (1987). Metode Penelitian Survey, Jakarta, PT. *Pustaka LP3ES Indonesia*.
- Subianto, I. (2008). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten Sidoarjo, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Suharto *et al.* (2004). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi kasus keluarga miskin di Indonesia, lembaga Studi Pembangunan (LPS) STKS, Bandung, Indonesia.
- Suharto, E. (2002). “Coping Strategies dan Keberfungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan.” *Makalah pada Seminar*

"Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pesswrengangunan Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial" Selasa. Vol. 17.

Suharto, E. (1998). *Human Development Strategy: The Quest for Paradigmatic and Pragmatic Intervention for the Urban Informal Sector* (No. 98/2). Working paper.

Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2015). Peta Indikator Kemiskinan per kabupaten provinsi Nusa Tenggara Barat.

Willis, K. (2011). *Theories and practices of development*. Taylor & Francis.

Word Bank. (2006). Era baru dalam pengentasn kemiskinan di Indonesia. Jakarta.

Yacoub, Y. (2013). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.